



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

LAPORAN KINERJA

Triwulan I 2024

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada BPBAP Ujung Batee dalam kurun waktu sampai dengan Triwulan I Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi BPBAP Ujung Batee dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.



Aceh Besar, 25 April 2024

Kepala

Manijo, S.St.Pi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sumber Daya Manusia	3
1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya.....	5
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	6
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	8
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	8
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	13
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	14
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja	18
1. SS-1: Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee	18
2. SS-2: Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan	19
3. SS-3: Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.....	20
4. SS-4: Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya	24
5. SS-5: Meningkatnya kualitas pengendalian pakan dan obat ikan	27



6.	SS-6: Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee	28
3.3.	Efisiensi.....	39
3.4.	Kinerja Anggaran.....	39
BAB 4.	PENUTUP	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumberdaya Manusia Status PNS Berdasarkan Jabatan.....	3
Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	13
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024.....	16
Tabel 4. Nilai PNBPN yang diperoleh.....	18
Tabel 5. Perbandingan capaian nilai PNBPN dengan UPT sejenis.....	19
Tabel 6. Persentase pakan mandiri yang produksi	20
Tabel 7. Perbandingan capaian produksi pakan mandiri dengan UPT sejenis	20
Tabel 8. Persentase produksi calon induk unggul	20
Tabel 9. Persentase calon induk yang disalurkan	21
Tabel 10. Perbandingan capaian calon induk yang disalurkan dengan UPT sejenis	22
Tabel 11. Persentase bantuan benih yang disalurkan	22
Tabel 12. Perbandingan capaian bantuan benih dengan UPT sejenis.....	23
Tabel 13. Sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat.....	23
Tabel 14. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan.....	24
Tabel 15. Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji.....	25
Tabel 16. Jumlah sampel pengujian berdasarkan ruang lingkup uji.....	25
Tabel 17. Perbandingan capaian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji dengan UPT sejenis.....	25
Tabel 18. Persentase pengujian sampel antimikrobia resistan (AMR).....	26
Tabel 19. Perbandingan pengujian antimikrobia resistan dengan UPT sejenis.....	26
Tabel 20. Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan.....	27
Tabel 21. Persentase capaian pakan dan obat ikan yang diuji dengan UPT sejenis.....	27
Tabel 22. Nilai rekonsiliasi kinerja BPBAP Ujung Batee	28
Tabel 23. Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA	29
Tabel 24. Indeks profesionalitas ASN unit kerja	30
Tabel 25. Indeks pengelolaan kepegawaian	31



Tabel 26. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	32
Tabel 27. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya	33
Tabel 28. Persentase Penyelesaian LHP BPK	33
Tabel 29. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	34
Tabel 30. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	35
Tabel 31. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN.....	36
Tabel 32. Nilai Kinerja Anggaran.....	36
Tabel 33. Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa	37
Tabel 34. Nilai pengawasan kearsipan.....	38
Tabel 35. Persentase layanan perkantoran	38
Tabel 36. Pagu anggaran tahun 2020-2024	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBAP Ujung Batee	3
Gambar 2. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan jabatan	4
Gambar 3. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan tingkat pendidikan	4
Gambar 4. Potensi Perikanan Budidaya	5
Gambar 5. <i>Screenshot</i> Nilai Kinerja Triwulan I Tahun 2024	15
Gambar 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2020-2024	40

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPBAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan perjanjian kinerja pada bulan September telah ditetapkan 6 Sasaran Strategis (SS) dan 24 indikator kinerja, dan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPBAP Ujung Batee sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sesuai aplikasi “kinerjaku” adalah sebesar 117,57%. Dari 24 indikator kinerja yang telah dilaksanakan dan dilakukan pengukuran capaian terdapat 8 indikator telah mencapai target yaitu:

1. Nilai PNBPN yang Diperoleh tercapai 499,65 %
2. Persentase bantuan benih yang disalurkan tercapai 338,92 %
3. Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji tercapai 140,73 %
4. Persentase pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) tercapai 100 %
5. Persentase pakan ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan tercapai 466,67 %
6. Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee tercapai 133,33%
7. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee tercapai 116,28 %
8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee tercapai 118,05 %

Sementara itu indikator kinerja belum ada capaian karena tidak ada target di Triwulan I 2024 yaitu:

1. Persentase pakan mandiri yang diproduksi
2. Persentase calon induk unggul yang diproduksi
3. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan
4. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan
5. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan
6. Nilai penilaian mandiri SAKIP BPBAP Ujung Batee
7. Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee
8. Nilai kinerja anggaran BPBAP Ujung Batee
9. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee
10. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee
11. Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA
12. Indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee



13. Indeks pengelolaan kepegawaian

14. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

15. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee

16. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa indikator kinerja yang masih di bawah target yang ditetapkan perlu senantiasa dilakukan melalui kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung indikator kinerja dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang dapat terjadi peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan secara efektif dan efisien.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024, telah mengamanatkan untuk terus melakukan pembangunan perikanan budidaya secara berkelanjutan, karena diyakini dengan potensi dan kekuatan yang ada, perikanan budidaya mampu memberi kontribusi pada 9 agenda pembangunan nasional pemerintah (NAWACITA), diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi (termasuk pembudidaya ikan), serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budidaya yang memiliki daya saing. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budidaya 2020-2024.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam beberapa perspektif dengan masing-masing indikator kinerja seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Balai Budidaya Perikanan Air Payau Ujung Batee (BPBAP) Ujung Batee. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPBAP Ujung Batee Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu

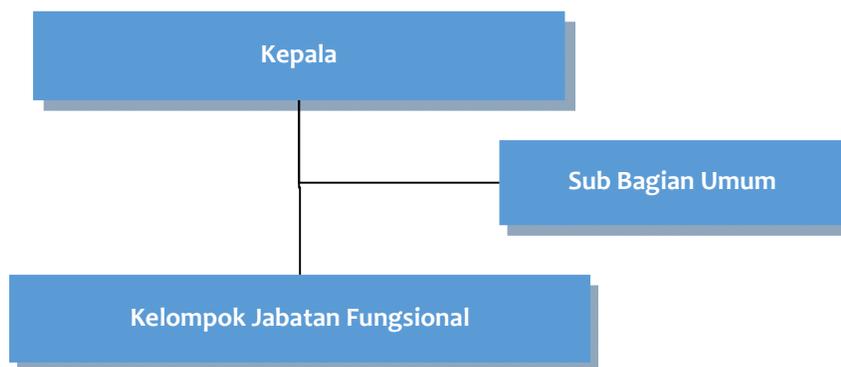
kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budidaya kedepan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya, disebutkan bahwa tugas Balai Budidaya Perikanan Air Payau (salah satunya BPBAP Ujung Batee) adalah ***“melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya air payau”***. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPBAP Ujung Batee mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya air payau;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya air payau;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau terdiri atas: a) Subbagian Umum; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



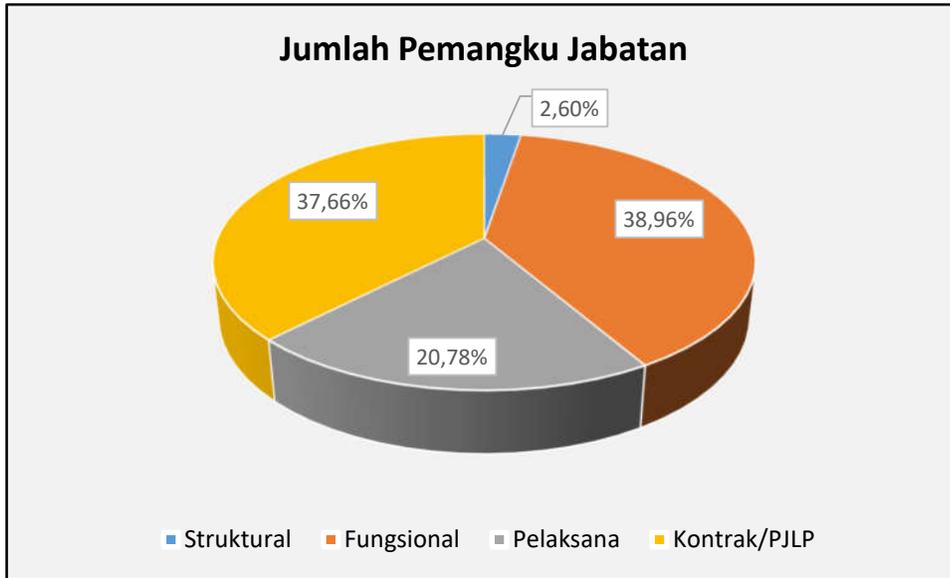
Gambar 1. Struktur Organisasi BPAP Ujung Batee

1.4. Sumber Daya Manusia

Total keseluruhan pegawai BPAP Ujung Batee sebanyak 76 orang, dengan rincian status PNS sebanyak 42 orang, PPPK sebanyak 6 orang dan tenaga kontrak/PJLP sebanyak 29 orang. Pegawai yang berstatus PNS didominasi oleh fungsional tertentu sebanyak 30 orang, sementara pelaksana hanya sebanyak 16 orang, dan pejabat struktural 2 orang.

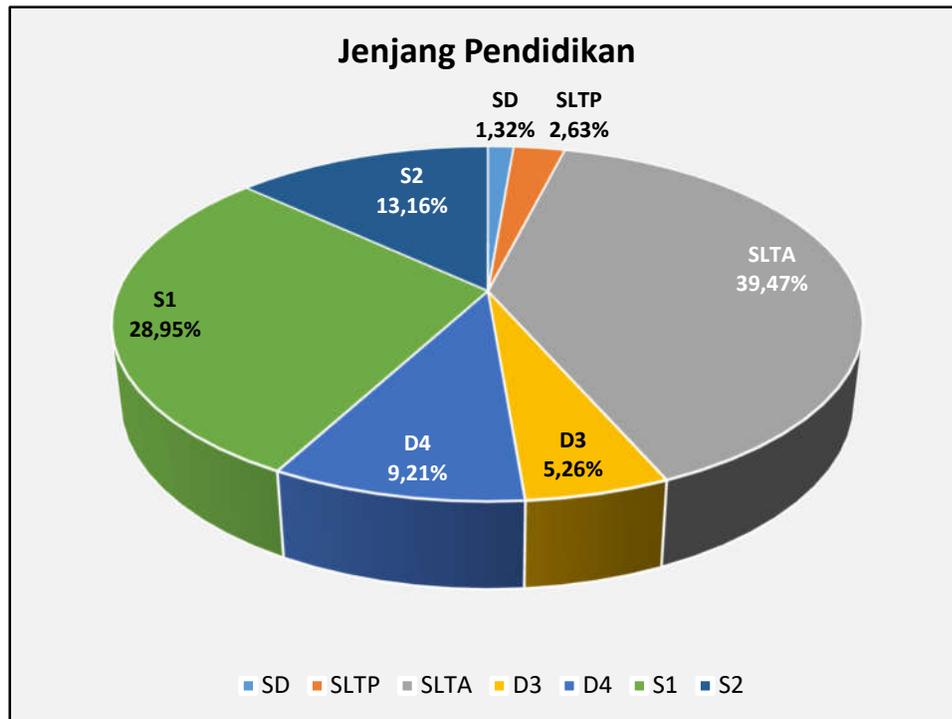
Tabel 1. Sumberdaya Manusia Status PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Nama/Jenjang Jabatan	PNS (orang)	PPPK (orang)
1	Struktural	1 Kepala Balai	1	
		2 Kepala Sub Bagian Umum	1	
2	Fungsional	1 Analis Akuakultur Ahli Muda	2	
		2 Analis Akuakultur Ahli Pertama	-	3
		3 Pengawas Perikanan Ahli Madya	1	
		4 Pengawas Perikanan Ahli Muda	7	
		5 Pengawas Perikanan Ahli Pertama	2	
		6 Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	4	
		7 Pengawas Perikanan Pelaksana	2	
		8 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	2	
		9 Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	1	1
		10 Teknisi Akuakultur Pemula		2
		11 Teknisi Kesehatan Ikan Penyelia	1	
		12 Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	1	
		13 Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	
3	Pelaksana	1 Pengelola Laboratorium	1	
		2 Teknisi Perikanan Budidaya	9	
		3 Teknisi Listrik dan Jaringan	1	
		4 Analis Tata Usaha	1	
		5 Penyusun Laporan Keuangan	1	
		6 Pengelola Keuangan	1	
		8 Pengelola Surat	1	
		9 Pengadministrasi Barang Milik Negara	1	
		PNS dan PPPK		
Tenaga Kontrak dan PJLP				29



Gambar 2. Pegawai BPAP Ujung Batee berdasarkan jabatan

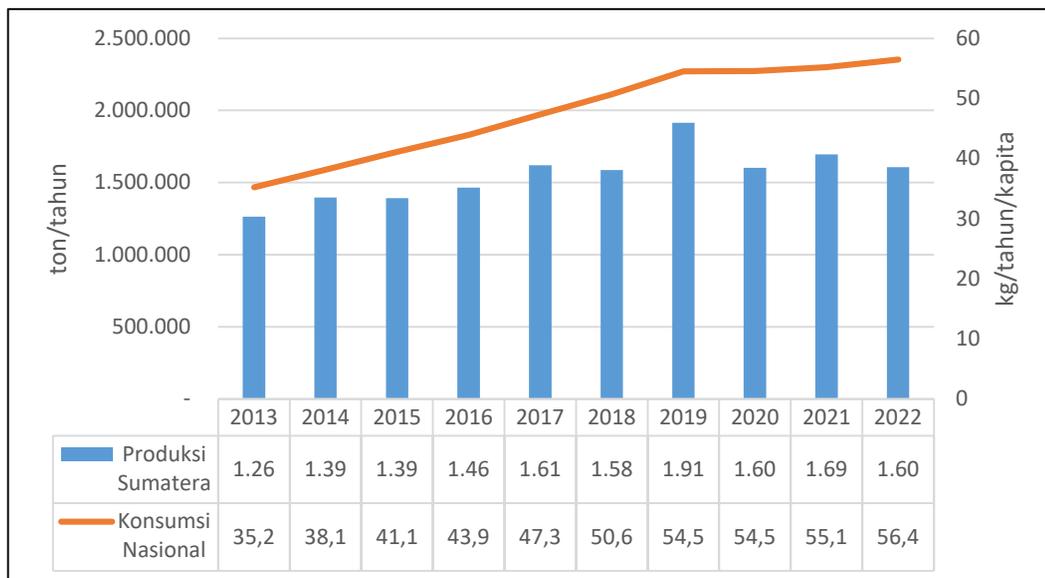
Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia BPAP Ujung Batee adalah sebagai berikut: (i) S2 sebanyak 9 orang (21%); (ii) S1 sebanyak 17 orang (40%); (iii) D4 sebanyak 4 orang (9%); (iv) D3 sebanyak 3 orang (7%); dan (v) SLTA sebanyak 10 orang (23%).



Gambar 3. Pegawai BPAP Ujung Batee berdasarkan tingkat pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya

Selama 10 tahun terakhir konsumsi ikan secara nasional mengalami peningkatan sebesar 60,41 %, tahun 2013 hanya 35,2 kg/tahun/kapita menjadi 56,4 kg/tahun/kapita di 2022. Sementara Volume produksi perikanan budidaya untuk wilayah Sumatera (sebagai wilayah kerja BPBAP Ujung Batee) tidak mengalami peningkatan sebanding dengan konsumsi ikan nasional, hanya meningkat sebesar 27,25 % dari tahun 2013 hanya 1,26 juta ton/tahun menjadi 1,6 juta ton/tahun di 2022 (sumber data diolah dari <https://statistik.kkp.go.id>). Adanya ketimpangan antara kebutuhan konsumsi ikan nasional dengan volume produksi menjadi potensi bagi BPBAP Ujung Batee untuk mendukung peningkatan volume produksi, melalui penyediaan induk dan benih yang berkualitas maupun bimbingan teknis perikanan budidaya.



Gambar 4. Potensi Perikanan Budidaya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budidaya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu permasalahan internal dan eksternal.

- a. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budidaya; (v) pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi) cara budidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan) belum optimal diterapkan oleh pelaku usaha perikanan budidaya; dan (vii) kondisi

infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budidaya secara efisien.

- b. Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budidaya meliputi: (i) ruang untuk usaha perikanan budidaya belum ada kepastian memadai, (ii) regulasi dan perizinan lintas sektoral belum begitu simetrik sehingga menghambat perkembangan usaha perikanan budidaya, dan (iii) perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan.

Lebih spesifik lagi permasalahan yang dihadapi BPBAP Ujung Batee yaitu adanya ketimpangan antara sumber daya (baik SDM maupun dukungan anggaran) dengan luas wilayah kerja. Wilayah kerja BPBAP Ujung Batee mencakup seluruh Sumatera yang begitu luas. Anggaran hanya cukup mengakomodir kegiatan di Aceh dan Sumut, selain itu instalasi budidaya perikanan BPBAP Ujung Batee hanya satu dan berada di Aceh Besar, sehingga sulit untuk menjangkau wilayah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, maupun Lampung.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj BPBAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBAP Ujung Batee selama kurun waktu Januari 2024 sampai dengan Maret 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBAP Ujung Batee serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBAP Ujung Batee, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program BPBAP Ujung Batee pada Tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran Tahun 2024, penetapan kinerja BPBAP Ujung Batee serta pengukuran/pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi indikator kinerja BPBAP Ujung Batee serta evaluasi dan analisis kinerja Tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan



saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Merujuk pada visi besar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Sedangkan tujuan pembangunan perikanan budidaya adalah:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah disebutkan di atas, BPBAP Ujung Batee menetapkan tujuan pokok dalam kegiatannya yaitu:

1. Melaksanakan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;



2. Melaksanakan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
3. Melaksanakan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
4. Melaksanakan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;
5. Mengelola pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;
6. Melaksanakan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
7. Melaksanakan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
8. Melaksanakan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
9. Melaksanakan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau.

Untuk melakukan pengukuran atas pencapaian tujuan yang ditetapkan maka harus ditetapkan pula sasaran strategis yang menjadi indikator keberhasilan ataupun kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut. Sasaran peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang berkembang. BPBAP Ujung Batee telah menetapkan Sasaran Strategis dalam kurun waktu 5 tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategi BPBAP Ujung Batee 2020 - 2024.

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Nilai PNBPN satker BPBAP Ujung Batee
2. **Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 2) Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 3) Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 4) Produksi calon induk di lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 5) Tersalurkannya sarana dan prasarana Bioflok ke masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 6) Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat
3. **Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 7) Persentase produksi pakan mandiri dibandingkan dengan bahan baku yang tersedia lingkup BPBAP Ujung Batee



4. **Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang pakan dan obat ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 8) Persentase jumlah sampel pakan ikan yang diuji nutrisi pakan oleh BPBAP Ujung Batee
5. **Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kawasan dan kesehatan ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 9) Persentase sampel layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 10) Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR) lingkup BPBAP Ujung Batee
6. **Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 11) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 12) Persentase Penyelesaian LHP BPK atas Satker BPBAP Ujung Batee
 - 13) Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 14) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 15) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satker BPBAP Ujung Batee
 - 16) Nilai Kinerja Anggaran satker BPBAP Ujung Batee
 - 17) Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa satker BPBAP Ujung Batee
 - 18) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN satker BPBAP Ujung Batee
 - 19) Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 20) Indeks pengelolaan kepegawaian lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 21) Persentase layanan perkantoran lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 22) Nilai pengawasan kearsipan lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 23) Hasil penilaian konsensus Zona Integritas lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 24) Persentase jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya wilker BPBAP Ujung Batee

Matriks keselarasan indikator kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024 dengan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja 2024 dapat dilihat lebih detail pada Lampiran 1.



No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No Urut IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2024	Keterangan	
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat lingkup BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP dari perikanan budidaya (Rp 000)	1.034.278	1.167.145	1.251.476	1.376.624	1.514.286	1	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya dan Meningkatkan di BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP yang Diperoleh (Rupiah 000)	1.232.517	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
2	Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	2	Percantohan pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (kawasan)	1	2	1	1	1						Mengikuti dokumen perencanaan anggaran (DIPA) tahun 2024	
3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana LPT	3	UPT perikanan budidaya yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)		1	1	1	1						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
4	Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan	4	Sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didistribusikan ke masyarakat (kelompok)	7	17	15	15	15	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	6	Persentase Sarana dan Prasarana Biotek yang Disalurkan (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
5		5	Prasarana produksi dan usaha yang dikembangkan (unit)		1	1	1	1						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
6		6	Berih yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	7.110.000	7.683.315	8.000.000	9.000.000	10.000.000	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
7		7	Calon induk unggul yang disalurkan ke masyarakat (ekor)		14.820	15.000	15.000	15.000	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
8		8	Calon induk unggul yang diproduksi (ekor)	49.400	64.100	65.000	67.000	70.000	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
9		9	Pakan ikan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	100.000	70.000	72.000	75.000	77.000	2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan Untuk Pembudidayaan Ikan	2	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
10		10	Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)		37.000	37.000	37.000	37.000						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
11		11	Rehabilitasi sarana dan prasarana UPR/HSRT (unit)		3	3	3	3						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
12		12	Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT (paket)	1	4	4	4	4						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
13		13	Layanan Diseminasi Teknologi PB (layanan)		5	5	5	5	3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	7	Persentase Diseminasi Teknologi Perbesar Ikan (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
14	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif	14	Jumlah layanan sampel yang duji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar (sampel)	3.350	3.350	3.450	3.550	3.650	4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Duji (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
15		15	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)						5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan	10	Persentase Pakan Ikan yang Duji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100	Terobosan kebijakan di DJPB	
														100	Terobosan kebijakan di DJPB



No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No Urut IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2024	Keterangan
6	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPAP Ujung Batee	15	Indeks profesionalisme ASN lingkup BPAP Ujung Batee (%)	72	73	74	75	76	6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di BPAP Ujung Batee	13	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPAP Ujung Batee (Indeks)	85	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		16	Penyelesaian LHP BPK atas BPAP Ujung Batee (%)	100	100	100	100	100			17	Persentase Pemeliharaan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Satter BPAP Ujung Batee (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		17	Nilai rekon pengelolaan kinerja BPAP Ujung Batee (%)	85	90	92	94	96			11	Nilai PM SAKIP BPAP Ujung Batee (Nilai)	82	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		18	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPAP Ujung Batee yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas (%)	60	65	70	75	85			18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		19	Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	85	87	90						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPAP Ujung Batee (%)	88	89	90	91	92			19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPAP Ujung Batee (Nilai)	93,76	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		21	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPAP Ujung Batee (%)	85	86	87	88	89			21	Nilai Kinerja Anggaran BPAP Ujung Batee (Nilai)	86	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa (%)		72,5	75	75	75			22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		23	Tingkat pengelolaan barang milik negara (%)		72,5	75	75	75			20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											12	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											14	Indeks Pengelolaan Kepegawain (Indeks)	4	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											15	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											16	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPAP Ujung Batee (Persen)	86	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											23	Nilai Pengawasan Kearsipan BPAP Ujung Batee (Nilai)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											24	Persentase Layanan Periklanan BPAP Ujung Batee (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja BPAP Ujung Batee tahun 2024 dituangkan dalam perjanjian kinerja (sebagai mana terlampir).

Pada Penetapan Kinerja BPAP Ujung Batee Tahun 2024 terdapat beberapa perbedaan target dengan target yang tercantum pada Rencana Strategi BPAP Ujung Batee 2020-2024 hal ini terjadi karena adanya penyesuaian menindaklanjuti kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dan tindak lanjut dari hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat Di BPAP Ujung Batee	1.	Nilai PNBP yang Diperoleh (Rupiah)	1.232.517.000
2.	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Pakan Ikan untuk Pembudidaya Ikan	2.	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3.	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75
		5.	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75
		6.	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100
		7.	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8.	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
		9.	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan Dan Obat Ikan	10.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
6.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di BPAP Ujung Batee	11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPAP Ujung Batee (Nilai)	82
		12.	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPAP Ujung Batee (Indeks)	85
		14.	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		15.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		16.	Persentase Pemberitaan Netral Dan Positif Terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPAP Ujung Batee (Persen)	86
		17.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPAP Ujung Batee (Persen)	100



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPAP Ujung Batee (Persen)	80
	19. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPAP Ujung Batee (Nilai)	93,76
	20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPAP Ujung Batee (Persen)	80,0
	21. Nilai Kinerja Anggaran BPAP Ujung Batee (Nilai)	86
	22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	80,0
	23. Nilai Pengawasan Kearsipan BPAP Ujung Batee (Nilai)	75
	24. Persentase Layanan Perkantoran BPAP Ujung Batee (Persen)	80

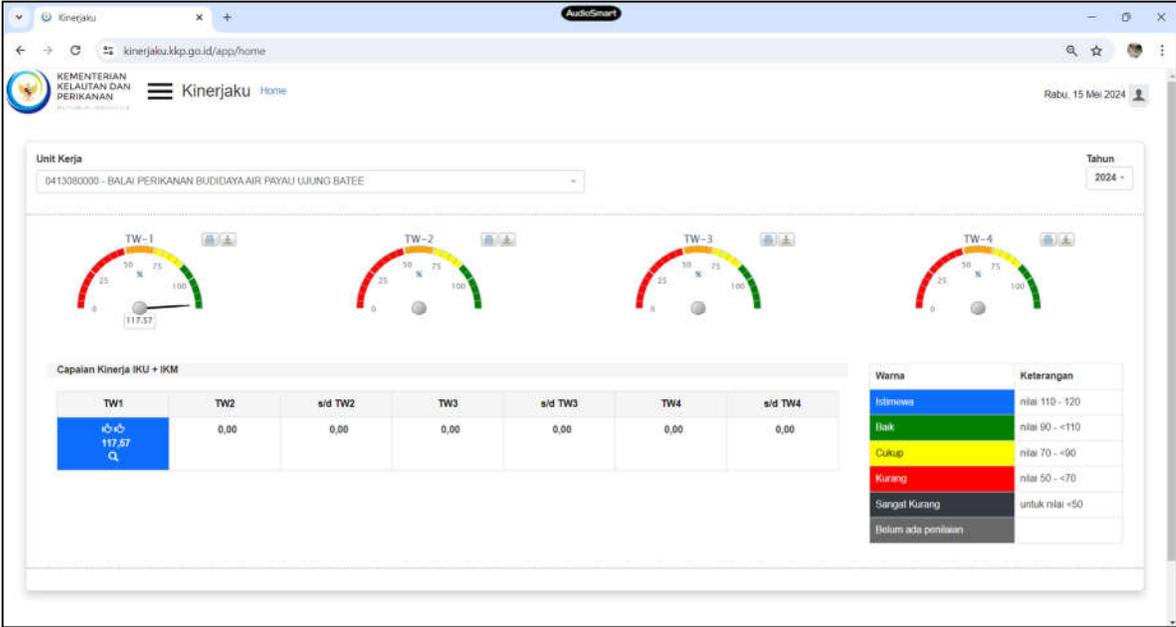
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja BPAP Ujung Batee menggunakan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*. 1) *Maximize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik; 2) *Minimize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik; dan 3) *Stabilize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Pengukuran capaian Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup BPAP Ujung Batee) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>;
5. Status capaian Indikator Kinerja yang ada dalam aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> ditunjukkan dengan warna: (i) hitam, kategori sangat kurang (untuk nilai <50); (ii) merah, kategori kurang (nilai 50 - <70); (iii) kuning, kategori cukup (nilai 70 - <90); (iv) hijau, kategori baik (nilai 90 - <110); dan (v) biru, kategori istimewa (nilai 110 – 120).

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara

berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implemementasi aplikasi BSC "Kinerjaku" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.



Gambar 5. Screenshot Nilai Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>, terlihat bahwa Nilai Capaian Kinerja BPBAP Ujung Batee sebesar 117,57 % yang berada dalam kategori ISTIMEWA. Artinya secara umum indikator kinerja sudah melampaui target.



BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budidaya pada Tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPBAP Ujung Batee menitikberatkan pada 6 Sasaran Strategis dengan 24 indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi "kinerjaku.kkp.go.id" diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 117,57 %. Adapun rekapitulasi capaian kinerja BPBAP Ujung Batee pada Triwulan I Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2024

	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target s.d Tw I	Realisasi s.d Tw I	Realisasi Terhadap Target s/d Tw I (%)	Realisasi Terhadap Target 2024 (%)
1	Nilai PNBP yang diperoleh	1.232.517	Ribuan Rupiah	60.750	303.540	499,65	24,63
2	Persentase pakan mandiri yang diproduksi	80	Persen	-	-	-	-
3	Persentase calon induk unggul yang diproduksi	100	Persen	-	-	-	-
4	Persentase bantuan calon induk yang disalurkan	75	Persen	-	-	-	-
5	Persentase bantuan benih yang disalurkan	75	Persen	16,61	56,30	338,92	75,07
6	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan	100	Persen	-	-	-	-
7	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan	100	Persen	-	-	-	-
8	Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji	100	Persen	24,77	34,86	140,73	34,86
9	Persentase pengujian antimikrobia resistan (AMR)	100	Persen	22,86	22,86	100	22,86
10	Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan	100	Persen	25	116,67	466,67	116,67
11	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPBAP Ujung Batee	82	Nilai	-	-	-	-
12	Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee	91	Persen	-	-	-	-
13	Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee	85	Indeks	-	-	-	-
14	Indeks pengelolaan kepegawaian	4	Indeks	-	-	-	-
15	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	76	Nilai	-	-	-	-
16	Persentase pemberitaan netral dan	86	Persen	86	100	116,28	116,28



Indikator Kinerja		Target	Satuan	Target s.d Tw I	Realisasi s.d Tw I	Realisasi Terhadap	Realisasi Terhadap
	positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee						
17	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee	100	Persen	-	-	-	-
18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee	80	Persen	80	94,44	118,05	118,05
19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee	93,76	Nilai	-	-	-	-
20	Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee	80	Nilai	-	-	-	-
21	Nilai kinerja anggaran BPBAP Ujung Batee	86	Nilai	-	-	-	-
22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee	80	Nilai	-	-	-	-
23	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee	75	Nilai	-	-	-	-
24	Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee	80	Persen	75	100	133,33	125

Capaian target indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 ada 8 indikator yang mencapai dan melebihi target ζ indikator kinerja yaitu:

- 1) Nilai PNPB yang diperoleh (IK2) tercapai sebesar 499,65 %
- 2) Persentase bantuan benih yang disalurkan (IK5) tercapai sebesar 338,92 %
- 3) Persentase kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji (IK8) tercapai sebesar 140,73 %
- 4) Persentase pengujian Antimicrobial Resistance (IK9) tercapai sebesar 100 %
- 5) Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan (IK10) tercapai sebesar 466,67 %
- 6) Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (IK16) tercapai sebesar 116,28 %
- 7) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee (IK18) tercapai sebesar 118,05 %
- 8) Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee (IK24) tercapai sebesar 133,33 %.

Sementara sebanyak 16 indikator kinerja tidak ada capaian karena tidak ada target di Triwulan I dan akan dihitung pada triwulan berikutnya. Secara umum indikator kinerja BPBAP Ujung Batee telah tercapai. Begitu pun pada capaian kinerja secara keseluruhan terlihat capaian target mencapai 117,57 % (dapat dilihat pada Gambar 5).

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut:

1. SS-1: Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPAP Ujung Batee

IK-1: Nilai PNBP yang diperoleh

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dasar hukum pemungutan PNBP pada BPAP Ujung yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang pedoman umum PNBP dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sumber PNBP BPAP Ujung Batee berasal dari:

- 1) Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yaitu PNBP yang berasal dari pungutan perikanan. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha budidaya Perikanan.
- 2) PNBP Non SDA yaitu PNBP yang berasal dari penjualan hasil usaha budidaya dan imbalan jasa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. PNBP ini terdiri dari: (i) Penjualan hasil Perikanan Budidaya; (ii) Imbal Jasa Teknologi; (iii) Jasa Desiminasi; (iv) Jasa Penggunaan Laboratorium; (v) Jasa Penggunaan fasilitas; (vi) Jasa Fasilitas Lainnya; dan (vii) Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Tabel 4. Nilai PNBP yang diperoleh

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
60.750.000	303.540.101	499,65	26.847.190	1130,62	1.232.517.000	24,63

Target nilai PNBP BPAP Ujung Batee tahun 2024 adalah Rp. 1.232.517.000. Realisasi nilai PNBP pada Triwulan I tahun 2024 mencapai Rp. 303.540.101 atau mencapai 24,63 % dari target tahunan. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I tahun 2023 sebesar Rp. 26.847.190 maka realisasi nilai PNBP Triwulan I tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1130,62 %. Analisis tingginya capaian dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2023 karena pada bulan Januari 2024 telah dilakukan panen tambak udang yang proses pembesaran telah dilakukan sejak akhir tahun sebelumnya. Selain itu penerimaan dari layanan pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan juga ikut menyumbang realisasi nilai PNBP Triwulan I tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan UPT Budidaya Air Payau eselon 3 lainnya, capaian nilai PNBP BPAP Ujung Batee termasuk rendah dalam hal jumlah rupiah dibandingkan UPT Payau DJPB. Namun persentase nilai capaian PNBP BPAP Ujung Batee (24,63 %) lebih tinggi dibanding UPT Payau DJPB pada Triwulan I tahun 2024.

Tabel 5. Perbandingan capaian nilai PNBP dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target 2024	Target TW I (Rp.)	Capaian TW I (Rp.)	Realisasi terhadap target tahunan (%)
1.	BBPBAP Jepara	4.500.400.000	1.100.000.000	469.236.198	10,43
2.	BPBAP Situbondo	3.552.374.000	355.237.400	530.693.024	14,94
3.	BPBAP Ujung Batee	1.232.517.000	60.750.000	303.540.101	24,63
4.	BPBAP Takalar	1.638.158.000	252.473.700	353.660.042	21,01

Pada periode Triwulan I tahun 2024, BPBAP Ujung Batee telah melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan Triwulan IV tahun 2023 yaitu pemenuhan target nilai PNBP sesuai rencana realisasi. Tidak ada kendala dalam pencapaian nilai PNBP pada Triwulan I tahun 2024 namun terdapat potensi kendala yang mungkin terjadi seperti serangan penyakit dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi produksi budidaya, ketidakpastian jumlah pembeli hasil produksi budidaya dan pengguna jasa pengujian sampel laboratorium. Rencana tindak lanjut pencapaian nilai PNBP BPBAP Ujung Batee periode berikutnya pada Triwulan II adalah melanjutkan pemenuhan target nilai PNBP sesuai rencana realisasi yang dijadwalkan.

2. SS-2: Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan

IK-2: Persentase pakan mandiri yang diproduksi

Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders bidang perikanan budidaya, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan memberikan dampak positif terhadap kinerja perikanan budidaya sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Terkait dengan bidang perikanan budidaya, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan meliputi bidang pakan dan obat ikan, perbenihan, produksi dan usaha budidaya dan kawasan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.

Produksi pakan mandiri BPBAP Ujung Batee bertujuan untuk menyediakan pakan buatan untuk bantuan ke masyarakat pembudidaya lingkup BPBAP Ujung Batee. Pakan buatan yang dihasilkan adalah pakan terapung untuk ikan air payau dan pakan tenggelam untuk ikan air payau.

Tabel 6. Persentase pakan mandiri yang produksi

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	8,60	-	80,00	-

Belum terdapat capaian produksi pakan mandiri pada Triwulan I tahun 2024 karena tidak terdapat target capaian pada Triwulan I. Pada periode yang sama tahun 2023 produksi pakan mandiri sebesar 8,6 %, adapun total target tahunan yang ingin dicapai pada tahun 2024 sebesar 80%. Kegiatan produksi pakan mandiri pada Triwulan I tahun 2024 masih dalam proses persiapan dan pengadaan bahan baku.

Tabel 7. Perbandingan capaian produksi pakan mandiri dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target Triwulan I (%)	Capaian (%)
1.	BBPBAP Jepara	15	60,68
2.	BPBAP Situbondo	10	10,1
3.	BPBAP Ujung Batee	0	0
4.	BPBAP Takalar	0	0

Berdasarkan perbandingan capaian produksi pakan mandiri lingkup UPT Payau DJPB pada Triwulan I tahun 2024, BPBAP Ujung Batee dan BPBAP Takalar belum memiliki capaian pada kegiatan ini karena tidak ada penetapan target pada Triwulan I. Adapun UPT BBPBAP Jepara (60,68 %) dan BPBAP Situbondo (10,1 %) telah melampaui target produksi pakan mandiri yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2024. Rencana tindak lanjut produksi pakan mandiri oleh BPBAP Ujung Batee periode berikutnya pada Triwulan II akan menyelesaikan persiapan dan pengadaan bahan baku untuk proses produksi pakan mandiri memenuhi target capaian pada triwulan berikutnya.

3. SS-3: Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

IK-3: Persentase calon induk unggul yang diproduksi

Produksi induk unggul di BPBAP Ujung Batee bertujuan untuk menyediakan induk bagi unit perbenihan pada masyarakat stakeholder perikanan budidaya. Tersedianya induk unggul akan mendukung peningkatan produksi benih yang merupakan komponen utama kegiatan pengembangan kualitas dan kuantitas produksi perikanan budidaya.

Tabel 8. Persentase produksi calon induk unggul

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	100,00	-

Belum terdapat besaran capaian produksi calon induk unggul pada Triwulan I tahun 2024 karena pemeliharaan calon induk dilakukan sampai mencapai standar ukuran sesuai

persyaratan petunjuk teknis sehingga tidak terdapat target capaian pada Triwulan I. Oleh karena itu capaian IKU calon induk unggul yang diproduksi tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU yang sama pada Triwulan I tahun 2023. Kegiatan produksi calon induk pada Triwulan I tahun 2024 menindaklanjuti rencana pada Triwulan IV tahun 2023 yaitu monitoring pelaksanaan produksi dan memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga dapat meningkatkan produksi calon induk unggul. Serangan penyakit dan kondisi lingkungan menjadi kendala dalam proses produksi calon induk unggul. Rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya adalah memelihara calon induk unggul sampai mencapai standar ukuran yang ditetapkan sesuai petunjuk teknis.

IK-4: Persentase bantuan calon induk yang disalurkan

Persentase bantuan calon induk yang disalurkan merupakan kegiatan bantuan calon induk ikan yang disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan. Adapun komoditas-komoditas calon induk yang disalurkan ke masyarakat mengaju pada petunjuk teknis penyaluran bantuan calon induk tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP. Capaian diukur berdasarkan persentase jumlah penyaluran bantuan calon induk ikan dibandingkan dengan jumlah target bantuan calon induk ikan sesuai anggaran yang disediakan.

Tabel 9. Persentase calon induk yang disalurkan

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	75,00	-

Belum terdapat realisasi capaian persentase bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat pada Triwulan I tahun 2024 karena kegiatan pada triwulan ini masih dalam proses untuk memproduksi calon induk yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk bantuan. Selain itu capaian IKU persentase bantuan calon induk unggul yang disalurkan tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU yang sama pada Triwulan I tahun 2023. Kegiatan rencana tindak lanjut Triwulan IV tahun 2023 yang dilakukan pada kegiatan Triwulan I tahun 2024 adalah meneruskan pelaksanaan produksi calon induk dengan memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga hasil produksi dapat disalurkan sebagai bantuan ke masyarakat. Tujuan bantuan calon induk ke masyarakat adalah untuk meremajakan induk yang ada di unit pembenihan masyarakat sehingga dapat menghasilkan benih yang bermutu dan mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya. Kendala dalam penyaluran bantuan calon induk adalah tergantung dari ketersediaan hasil produksi calon induk.

Tabel 10. Perbandingan capaian calon induk yang disalurkan dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target Triwulan I (%)	Capaian (%)
1.	BBPBAP Jepara	-	-
2.	BPBAP Situbondo	-	-
3.	BPBAP Ujung Batee	-	-
4.	BPBAP Takalar	10	165,29

Tidak semua UPT Payau DJPB memiliki kegiatan penyaluran bantuan calon induk, antara lain BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo. Kegiatan penyaluran bantuan calon induk oleh BPBAP Ujung Batee belum memiliki capaian realisasi pada Triwulan I tahun 2024, hanya BPBAP Takalar yang memiliki capaian penyaluran bantuan calon induk sebesar 165,29 % melampaui target sebesar 10 %. Rencana tindak lanjut BPBAP Ujung Batee untuk kegiatan penyaluran bantuan calon induk pada periode berikutnya adalah memelihara calon induk unggul sampai mencapai standar ukuran yang dipersyaratkan untuk bantuan.

IK-5: Persentase bantuan benih yang disalurkan

Guna pencapaian target kebutuhan bahan baku industri pengolahan dari sektor hulu terutama dari komoditas budidaya unggulan, maka sub sektor perbenihan memegang peranan sangat penting untuk menyediakan benih bermutu yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi, efisiensi dan efektivitas kegiatan budidaya.

Tabel 11. Persentase bantuan benih yang disalurkan

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
16,61	56,30	338,92	3,10	1816,12	75,00	75,07

Pada periode Triwulan I tahun 2024 realisasi untuk IK bantuan benih yang disalurkan adalah 56,3 % dibandingkan target pada Triwulan I (16,61 %). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (75 %) maka realisasi capaian bantuan benih yang disalurkan pada Triwulan I sebesar 75,07 %. Realisasi persentase bantuan benih yang disalurkan mengalami pertumbuhan 1816,12 % dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Tindak lanjut dari rencana Triwulan IV tahun 2023 yang dilakukan pada kegiatan Triwulan I tahun 2024 adalah melanjutkan proses produksi benih serta memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga mampu meningkatkan produksi benih dan menghasilkan benih yang sesuai dengan standar persyaratan penyaluran ke masyarakat. Tidak ditemukan kendala dalam penyaluran bantuan benih sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Tabel 12. Perbandingan capaian bantuan benih dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target Triwulan I (%)	Capaian (%)
1.	BBPBAP Jepara	-	-
2.	BPBAP Situbondo	-	-
3.	BPBAP Ujung Batee	16,61	56,3
4.	BPBAP Takalar	10	276,59

Capaian kegiatan penyaluran bantuan benih oleh BPBAP Ujung Batee pada Triwulan I tahun 2024 (56,3 %) lebih rendah dari BPBAP Takalar (276,59 %) namun telah melampaui target Triwulan I (16,61 %). Adapun BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo tidak terdapat kegiatan penyaluran benih ke masyarakat. Rencana tindak lanjut kegiatan penyaluran bantuan benih oleh BPBAP Ujung Batee untuk periode berikutnya adalah mempertahankan kinerja produksi benih untuk memenuhi target bantuan benih yang akan disalurkan pada tahun 2024 sesuai dengan target yang akan dicapai.

IK-6: Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan

BPBAP Ujung Batee selain penyedia benih bermutu, dilakukan pencontohhan pengelolaan produksi dan usaha melalui sarana bioflok yang diserahkan kepada masyarakat sehingga produksi perikanan budidaya dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Budidaya perikanan sistem bioflok merupakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang menggunakan metode pemanfaatan gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mikroorganisme hidup yang melayang-layang di air.

Percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya di masyarakat merupakan bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi budidaya ikan sistem bioflok. Percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya di masyarakat berupa bantuan sarana prasarana produksi budidaya ikan sistem bioflok diperuntukan bagi komoditas ikan Lele dan capaian perhitungan IKU bersifat tahunan.

Tabel 13. Sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	100,00	-

Belum terdapat realisasi capaian sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat pada Triwulan I tahun 2024 karena belum dilakukan pengukuran mengingat tidak terdapat penetapan target pada triwulan I. Selain itu capaian IKU sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU yang sama pada Triwulan I tahun 2023. Kegiatan pada Triwulan I tahun 2024 ini masih dalam tahap identifikasi verifikasi dan pengadaan sarana prasarana. Kegiatan rencana tindak lanjut Triwulan IV tahun 2023 yang dilaksanakan pada kegiatan Triwulan I tahun 2024 yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi kelompok yang telah mengajukan proposal bantuan.

Rencana tindak lanjut pada periode berikutnya adalah melakukan identifikasi dan verifikasi kelompok yang telah mengirimkan proposal bantuan serta melakukan distribusi bantuan dan serah terima bantuan kepada kelompok

IK-7: Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan

Diseminasi teknologi pembesaran ikan merupakan suatu kegiatan interaktif dalam menyampaikan informasi teknologi budidaya perikanan pada lokasi yang telah ditentukan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku pembudidaya perikanan untuk dapat meningkatkan produksi. Capaian dari kegiatan ini dihitung berdasarkan persentase jumlah diseminasi teknologi yang telah disampaikan ke masyarakat dibandingkan dengan jumlah target kegiatan diseminasi teknologi sesuai perencanaan.

Tabel 14. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	100,00	-

Belum terdapat realisasi capaian diseminasi teknologi pembesaran ikan pada Triwulan I tahun 2024 karena belum ada target pada triwulan ini. Selain itu capaian indikator kinerja untuk IK diseminasi teknologi pembesaran ikan Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian IK yang sama pada Triwulan I tahun 2023. Kegiatan pada Triwulan I tahun 2024 ini masih dalam tahap proses pemilihan lokasi dan persiapan materi diseminasi. Rekomendasi atas rencana aksi pada Triwulan IV tahun 2023 yaitu mengidentifikasi pemilihan lokasi dan materi bimbingan teknis yang akan diberikan. Rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya adalah pelaksanaan diseminasi pada lokasi yang telah ditentukan.

4. SS-4: Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya

IK-8: Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji

Sasaran strategis yang ke empat dari BPBAP Ujung Batee ini merupakan wujud kepedulian balai terhadap pembudidaya ikan wilayah kerja dalam menjaga dan memelihara lingkungan budidaya ikan. Dalam sasaran ini BPBAP Ujung Batee telah menyediakan pelayanan dan fasilitas dalam bentuk laboratorium pengujian. Dalam mengelola laboratorium, analis melakukan uji sampel penyakit, parameter air dan analisa proksimat. Capaian kegiatan ini dihitung berdasarkan jumlah sampel layanan kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji dibandingkan dengan target sampel layanan kesehatan ikan dan lingkungan. Sampel layanan kesehatan ikan berasal dari monitoring internal BPBAP Ujung Batee maupun dari stakeholder eksternal.

Tabel 15. Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
24,77	34,86	140,73	23,53	148,15	100,00	34,86

* 2023 menggunakan satuan %.

Realisasi persentase kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji berhasil mencapai target Triwulan I yaitu sebesar 140,73 % dan mencapai sebesar 34,86 % dari target tahunan. Realisasi persentase kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji mengalami peningkatan pengujian sebesar 148,15 % apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2023. Adapun capaian sampel yang telah diuji sampai dengan Triwulan I tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Jumlah sampel pengujian berdasarkan ruang lingkup uji

Ruang Lingkup Uji	Jumlah Sampel
Kualitas air (kimia)	373
Mikrobiologi	50
Biologi molekuler	40
Jumlah	463

Pencapaian realisasi target pada Triwulan I tahun 2024 didominasi oleh pelayanan pengujian sampel kualitas air, sampel yang dihitung hanya pengujian secara kimiawi tidak termasuk pengujian fisika. Kendala dalam pengujian adalah belum ada pembaruan alat sehingga terkadang untuk kegiatan monitoring ke lapangan maka tidak dapat melakukan pelayanan pengujian *in situ* pada sampel internal, hal ini menjadi rekomendasi tindak lanjut pada Triwulan IV tahun 2023.

Tabel 17. Perbandingan capaian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target TW I (%)	Capaian TW I (%)
1.	BBPBAP Jepara	25	45,62
2.	BPBAP Situbondo	25	53,85
3.	BPBAP Ujung Batee	24,77	34,86
4.	BPBAP Takalar	25	290,86

Berdasarkan perbandingan capaian pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan antar UPT Payau DJPB, BPBAP Ujung Batee (34,86 %) memiliki capaian lebih rendah dibandingkan UPT Payau lainnya. Namun capaian BPBAP Ujung Batee telah melampaui target yang ditetapkan (24,77 %) pada Triwulan I tahun 2024. Rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya adalah mengajukan pembaruan/perbaikan peralatan pengujian sehingga kinerja laboratorium dapat meningkat untuk pelayanan pengujian sampel.

IK-9: Persentase pengujian antimikrobal resistan (AMR)

Pengendalian dan pengujian AMR (*Anti Microbial Resistance*) merupakan upaya pengendalian lingkungan melalui pengujian AMR yang telah dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Indikator ini bertujuan untuk mengendalikan bahaya cemaran residu yang dapat resistance baik pada lingkungan maupun organisme akuatik agar tidak terjadi resistensi yang berasal dari residu kegiatan perikanan budidaya yang dilakukan di wilayah kerja. Resistensi dapat timbul secara spontan melalui proses mutasi, selain itu gen dapat diwariskan secara vertikal atau dapat diperoleh dari bakteri lain secara horizontal melalui unsur genetik seluler seperti plasmid. Cara menghitung capaian kegiatan pengujian sampel ini adalah dengan menghitung jumlah sampel yang telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian AMR sesuai dengan laporan hasil uji.

Tabel 18. Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR)

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
22,86	22,86	100,00	11,76	194,38	100,00	22,86

Realisasi persentase pengujian sampel antimikrobal telah mencapai target Triwulan I yaitu sebesar 100 % dan 22,86 % jika dibandingkan dengan target tahunan. Capaian Triwulan I tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Alokasi penganggaran untuk perjalanan pengambilan sampel dan bahan pengujian telah dipisahkan dari kegiatan lain sesuai dengan rekomendasi Triwulan IV tahun 2023. Tidak terdapat kendala dalam pengambilan dan pengujian sampel antimikrobal pada Triwulan I tahun 2024.

Tabel 19. Perbandingan pengujian antimikrobal resistan dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target TW I (%)	Capaian TW I (%)
1.	BBPBAP Jepara	20	70
2.	BPBAP Situbondo	25	35,71
3.	BPBAP Ujung Batee	22,86	22,86
4.	BPBAP Takalar	5	200

Berdasarkan perbandingan capaian pengujian sampel antimikrobal resistan antar UPT Payau DJPB, BPBAP Ujung Batee (22,86 %) memiliki capaian lebih rendah dibandingkan UPT Payau lainnya. Namun capaian BPBAP Ujung Batee telah memenuhi target yang ditetapkan (22,86 %) pada Triwulan I tahun 2024. Rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya adalah melakukan pengambilan dan pengujian sampel antimikrobal resistan sesuai perencanaan.

5. SS-5: Meningkatnya kualitas pengendalian pakan dan obat ikan**IK-10: Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan**

Pengujian nutrisi dan mutu pakan ikan merupakan kegiatan pengujian laboratorium nutrisi pakan meliputi salah satu atau keseluruhan (lengkap) dari parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Capaian kegiatan ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah sampel pakan ikan yang telah diuji dibandingkan dengan target sampel pakan sesuai perencanaan.

Tabel 20. Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
25,00	116,67	466,67	23,53	495,83	100,00	116,67

Realisasi persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan berhasil mencapai target Triwulan I yaitu sebesar 466,67 % dan mencapai sebesar 116,17 % dari target tahunan. Realisasi persentase kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji mengalami pertumbuhan 495,83 % dibanding periode yang sama tahun 2023. Dilakukan alokasi penganggaran untuk perawatan dan penggantian periperal peralatan uji nutrisi sesuai dengan rekomendasi Triwulan IV tahun 2023. Namun masih terdapat kendala pada Triwulan I ini karena belum ada pembaruan terhadap kerusakan alat uji nutrisi dan mutu pakan sehingga tidak semua parameter uji dapat dilakukan. Selain itu juga tidak tersedia anggaran khusus perjalanan pengambilan sampel untuk pengujian nutrisi dan mutu pakan sehingga pencapaian indikator hanya sampling pasif yaitu menerima sampel yang masuk ke laboratorium untuk pemeriksaan uji nutrisi dan mutu pakan.

Tabel 21. Persentase capaian pakan dan obat ikan yang diuji dengan UPT sejenis

No.	UPT Payau DJPB	Target TW I (%)	Capaian TW I (%)
1.	BBPBAP Jepara	22	27,14
2.	BPBAP Situbondo	25	50
3.	BPBAP Ujung Batee	25	116,67
4.	BPBAP Takalar	10	350

Jika dibandingkan dengan UPT Payau DJPB lainnya, capaian persentase pengujian sampel nutrisi dan mutu pakan Triwulan I tahun 2024 oleh BPBAP Ujung Batee lebih tinggi (116,67 %) dibandingkan BBPBAP Jepara (27,14 %) dan BPBAP Situbondo (50 %) namun lebih rendah dibanding BPBAP Takalar (350 %). Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan BPBAP Ujung Batee untuk periode berikutnya adalah melakukan pengujian sampel nutrisi berdasarkan sampel yang diperoleh atau ditargetkan.

6. SS-6: Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee

IK-11: Nilai rekonsiliasi kinerja BPBAP Ujung Batee

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi padapencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai rekon kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee merupakan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan tiga aspek, antara lain: Kepatuhan (Bobot 30%), Kesesuaian (30%), Ketercapaian (40%). Adapun selain pemenuhan dokumen SAKIP juga dilakukan sinkronisasi data antara Aplikasi Kinerjaku, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Manual IKU, Rencana Aksi, Lembar Capaian Kinerja.

Tabel 22. Nilai rekonsiliasi kinerja BPBAP Ujung Batee

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	82,00	-

Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I 2024 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Rencana aksi dan rekomendasi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah ditindaklanjuti yakni telah dilakukan pemenuhan dan dokumen kinerja. Kendala yang dialami masih sama dengan periode sebelumnya adalah kurangnya personil kerja yang aktif mengerjakan pemenuhan dokumen-dokumen kinerja, sehingga menyebabkan penyelesaian dokumen kinerja membutuhkan waktu yang lama. Solusi yang dilakukan adalah telah dilibatkan tenaga kontrak sebagai tenaga kerja tambahan dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja. Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan adalah perlunya penambahan personil kerja yang menangani pengelolaan kinerja dan meningkatkan koordinasi antar Kelompok Kerja dalam pemenuhan dokumen kinerja. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode yang akan datang adalah tetap melakukan pengelolaan kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

IK-12: Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPAP Ujung Batee

Indikator kinerja persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

Tabel 23. Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	91,00	-

Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I 2024 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Adapun progres kegiatan pada Triwulan I ini yaitu merekap dan membantu menginput calon penerima bantuan dalam aplikasi KUSUKA. Adapun rencana tindak lanjut untuk Triwulan berikutnya yaitu melanjutkan merekap dan membantu menginput calon penerima bantuan dalam aplikasi KUSUKA juga mendorong penyuluh dan pembudidaya untuk mendaftarkan ke KUSUKA.

IK-13: Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPAP Ujung Batee

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Badan Kepegawaian No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Standar profesional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang Pendidikan; 2) Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan; 3) Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai; dan Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Pengangkatan seorang pegawai di dalam jabatan diharapkan sesuai dengan kompetensinya sehingga prinsip the right man and the right place dapat terpenuhi. Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu nilai kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan agregasi dari nilai kompetensi (membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/assessment dari asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-SJ/2014), persentase capaian output SKP, persentase tingkat kehadiran dan kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN/LHKASN.

Tabel 24. Indeks profesionalitas ASN unit kerja

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	85,00	-

Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I 2024 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Untuk mencapai indeks profesionalisme ASN sesuai target didukung anggaran yang tergabung dalam kegiatan layanan manajemen SDM yaitu sebesar Rp 170.071.000 dan belum ada realisasi anggaran sampai dengan triwulan I 2024. Rekomendasi atas rencana aksi yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada pegawai tentang pentingnya pengembangan kompetensi. Rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya yaitu melakukan sosialisasi terkait bimtek/pelatihan yang mampu menaikkan nilai IP ASN pegawai BPBAP Ujung Batee.

IK-14: Indeks pengelolaan kepegawaian lingkup BPBAP Ujung Batee

Indeks pengelolaan kepegawaian adalah merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses

pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup BPAP Ujung Batee. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma). Pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

Tabel 25. Indeks pengelolaan kepegawaian

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023*	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	4,00	-

Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I 2024 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Rekomendasi atas rencana aksi yaitu mengidentifikasi yang mungkin menjadi penghambat pencapaian target. Rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya yaitu meningkatkan ketelitian dan kecermatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan.

IK-15: Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah suatu predikat yang diperoleh satker yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50;

- Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 (survei 3,20).

Predikat WBK merupakan status yang dapat disandang oleh unit kerja yang telah menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang transparan, bebas pungutan liar, dan mampu dipertanggungjawabkan secara berkala. Target unit kerja berpredikat WBK merupakan target yang diberikan kepada beberapa satuan kerja yang telah memiliki status WBK untuk dipertahankan dalam siklus 2 tahunan atau kepada unit kerja yang dipersiapkan untuk menjadi unit kerja bersertifikat WBK. Target ini dapat dinyatakan berhasil saat predikat yang telah diperoleh mampu dipertahankan oleh unit kerja.

Tabel 26. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	76,00	-

Indikator ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I 2024 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Rekomendasi atas rencana aksi adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang pentingnya peningkatan capaian nilai WBK lingkup BPBAP Ujung Batee. Rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya adalah melakukan update data/dokumen yang diperlukan terkait penilaian WBK

IK-16: Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee

Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budidaya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online. Kegiatan pendukung untuk mencapai indikator kinerja ini adalah pengumpulan dan pengolahan isu publik tentang pemberitaan dari media sosial yang mengunggah pemberitaan tentang KKP kemudian mengidentifikasi sifat pemberitaan (positif, negatif atau netral), serta membuat rekapitulasi.

Tabel 27. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
86,00	100,00	116,28	100,00	100	86,00	116,28

Terlihat pada tabel di atas bahwa sampai dengan periode Triwulan I 2024 telah dilakukan perhitungan capaian dengan angka capaian 100% atau 116,28% dari target triwulanan dan tahunan, hal ini menandakan bahwa selama kurun waktu Triwulan I 2024 ini tidak ditemukan adanya pemberitaan yang bersifat negatif terkait BPBAP Ujung Batee. Rekomendasi atas rencana aksi yaitu mengidentifikasi yang mungkin menjadi penghambat pencapaian target. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah tetap melakukan kegiatan monitoring hasil pemberitaan baik internal maupun eksternal. Meningkatkan ketelitian dan kecermatan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan.

IK-17: Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee

Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee merupakan persentase penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas BPBAP Ujung Batee sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah ditindaklanjuti/diselesaikan oleh BPBAP Ujung Batee. Kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2020. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan.

Tabel 28. Persentase Penyelesaian LHP BPK

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	100,00	-

Indikator kegiatan ini belum dilakukan perhitungan capaian pada periode Triwulan I 2024 dan belum ditargetkan sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2023 periode yang sama juga belum dilakukan perhitungan capaian atas pelaksanaan kegiatan ini. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja,



anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Rencana tindak lanjut akan mempertahankan komitmen untuk segera melakukan tindak lanjut penyelesaian LHP BPK (jika ada) dan selalu berkomunikasi dengan Inspektorat Jenderal KKP.

IK-18: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPAP Ujung Batee

Persentase pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPAP Ujung Batee merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2020. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPAP Takalar yang menjadi objek pengawasan. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan dalam satuan persen (%).

Tabel 29. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
80,00	94,44	118,05	100,00	94,44	80,00	118,05

Realisasi sudah melampaui target Triwulan I yaitu sebesar 118,05 %. Berbeda dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja tercapai 94,44 %. Rekomendasi atas rencana aksi yaitu mengidentifikasi penghambat pencapaian target. Rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan guna perbaikan kinerja dan meningkatkan komunikasi dengan Inspektorat Jenderal KKP terkait penyelesaian rekomendasi.

IK-19: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPAP Ujung Batee

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (1) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM

yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (2) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (3) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP), penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja.

Tabel 30. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	93,76	-

Pada periode Triwulan I 2024 belum dilakukan perhitungan penilaian terkait pengelolaan nilai indikator kinerja anggaran (NKA), begitu pula pada periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya (2023), sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja. Kegiatan ini akan dilakukan penilaian pada akhir tahun anggaran 2024. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Rekomendasi atas rencana aksi yaitu mengidentifikasi penghambat pencapaian target. Rencana aksi ke depan untuk tercapainya target kinerja ini yaitu dilakukannya kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meningkatkan ketepatan waktu dalam penginputan capaian output kegiatan tiap bulannya.

IK-20: Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPAP Ujung Batee

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

Tabel 31. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	80,00	-

Pada periode Triwulan I 2024 belum dilakukan perhitungan penilaian terkait kepatuhan pengelolaan BMN, begitu pula pada periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya (2023), sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja. Kegiatan ini akan dilakukan penilaian pada akhir tahun anggaran 2024. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja ini telah dilakukan beberapa kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 yaitu penetapan surat tugas operator BMN, monitoring dan pemantauan secara periodik melalui rekon pemanfaatan barang persediaan. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan ini, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Rencana aksi akan dilakukan pada periode selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengelolaan pengadaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

IK-21: Nilai kinerja anggaran BPAP Ujung Batee

Nilai kinerja anggaran merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kinerja suatu program. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2021. Nilai kinerja anggaran lingkup BPAP Ujung Batee diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) e-monev anggaran Kementerian Keuangan RI. Hasil pengukuran aspek impelentasi terdiri dari variabel: Penyerapan Anggaran, Konsistensi atas RPD (awal), Konsistensi atas RPD (akhir), Capaian Keluaran, dan Efisiensi.

Tabel 32. Nilai Kinerja Anggaran

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	86,00	-

Pada periode Triwulan I 2024 belum dilakukan perhitungan penilaian terkait pengelolaan nilai kinerja anggaran (NKA), begitu pula pada periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya (2023), sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja.

Kegiatan ini akan dilakukan penilaian pada akhir tahun anggaran 2024. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Rekomendasi atas rencana aksi yaitu mengidentifikasi penghambat pencapaian target. Rencana aksi ke depan untuk tercapainya target kinerja ini yaitu dilakukannya kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meningkatkan ketepatan waktu dalam penginputan capaian output kegiatan tiap bulannya.

IK-22: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPAP Ujung Batee

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah. Pada sektor pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berlangsung cukup sulit. Proses yang berlangsung harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar peraturan sedikitpun.

Definisi pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan terbilang sulit karena pembiayaannya berkaitan erat dengan APBN/APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor non pemerintah atau perusahaan, proses pengadaan yang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak rumit pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor non pemerintah, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.

Tabel 33. Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	80,00	-

Indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa sampai dengan triwulan I tahun 2024 belum ditargetkan. Hal ini dikarenakan indikator ini akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun anggaran 2024 dengan nilai target tahunan sebesar 80,00. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan ini untuk mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Rekomendasi atas rencana aksi Triwulan 1 2024 yaitu mengidentifikasi penghambat pencapaian tingkat kepatuhan Pengadaan

Barang dan jasa. Rencana tindak lanjut pada Triwulan berikutnya yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal dan output yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kontrak.

IK-23: Nilai Pengawasan Kearsipan BPAP Ujung Batee

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Tabel 34. Nilai pengawasan kearsipan

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
-	-	-	-	-	75,00	-

Kegiatan pengawasan kearsipan pada periode Triwulan I 2024 belum dilakukan perhitungan penilaian begitu pula pada periode yang sama di tahun anggaran sebelumnya (2023), sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja. Kegiatan ini akan dilakukan penilaian pada akhir tahun anggaran 2024. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini. Rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya pengusulan keikutsertaan pegawai dalam diklat kearsipan. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode selanjutnya yaitu tetap melakukan kegiatan kearsipan sesuai kaidah yang ditetapkan.

IK-24: Persentase layanan perkantoran BPAP Ujung Batee

Layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya. Selain pelayanan internal dalam kegiatan layanan perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja.

Tabel 35. Persentase layanan perkantoran

Tw I 2024			Realisasi Tw I 2023	Perbandingan Realisasi Tw I 2024 thd Tw I 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian %				
75,00	100,00	133,33	100,00	100,00	75,00	125,00

Indikator persentase layanan perkantoran berhasil mencapai target triwulan I sebesar 133,33 % dan target tahunan tercapai 125 %. Capaian triwulan I 2024 sebanding dengan periode yang sama pada tahun 2023. ini merupakan indikator baru pada tahun ini, sehingga tidak ada data yang bisa dibandingkan dengan tahun lalu. Anggaran layanan perkantoran yang tersedia pada tahun 2024 ini sebesar Rp 10.537.452.000. Kegiatan pada triwulan I ini melaksanakan kegiatan pelayanan perkantoran tepat waktu dan sesuai yang direncanakan. Rekomendasi atas rencana aksi yaitu mengidentifikasi penghambat pencapaian target. Rencana untuk periode berikutnya adalah meningkatkan ketelitian dan kecermatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan agar mencapai target yang ditentukan.

3.3. Efisiensi

Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran BPBAP Ujung Batee dilakukan penghitungan oleh aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

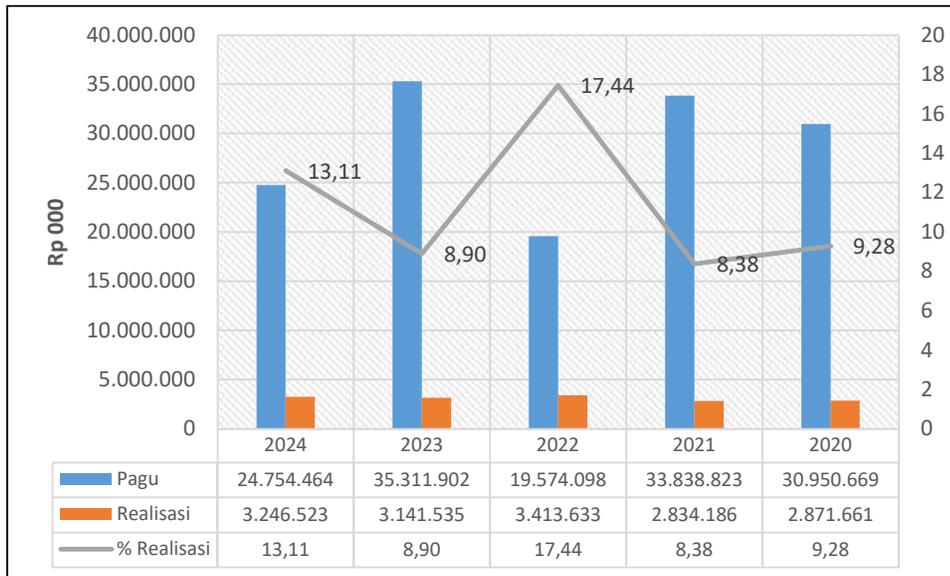
3.4. Kinerja Anggaran

Alokasi APBN tahun 2024 pada BPBAP Ujung Batee awalnya sebesar Rp 25.249.464.000, yang terbagi ke dalam beberapa aktivitas/kegiatan, kemudian revisi menjadi Rp 24.754.464.000. Sedangkan pada tahun 2023 mengelola anggaran akhir setelah beberapa kali refocusing menjadi sebesar Rp 35.311.902.000. Jika dibandingkan, alokasi anggaran tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 36. Pagu anggaran tahun 2020-2024

Aktivitas/Kegiatan	Anggaran 2024 (Rp 000)	Anggaran 2023 (Rp 000)	Anggaran 2022 (Rp 000)	Anggaran 2021 (Rp 000)	Anggaran 2020 (Rp 000)
Pengelolaan Perbenihan Ikan (2344)	3.859.888	4.506.581	2.712.761	4.744.920	8.605.365
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan (2345)	1.234.433	11.472.463	2.093.262	14.796.227	8.675.632
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan (2346)	7.080.000	7.429.000	3.500.000	2.698.400	1.400.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PB (2348)	11.835.773	11.244.282	10.675.751	9.767.689	11.335.272
Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747)	744.370	659.576	592.324	1.831.587	934.400
Total Anggaran	24.754.464	35.311.902	19.574.098	33.838.823	30.950.669

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PB (2348) pada tahun 2024 menjadi yang tertinggi alokasi anggarannya yaitu mencapai. Sedangkan kegiatan Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747) sebagai terendah sepanjang tahun 2020-2024.



Gambar 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2020-2024

Berdasarkan data dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sampai dengan Triwulan I dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Tahun 2024 tercapai sebesar Rp 3.346.523.000 (13,11 %) dari total pagu sebesar Rp 24.754.464.000. Realisasi masih terlihat rendah mengingat tahun anggaran baru berjalan 3 bulan.

BAB 4. PENUTUP

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee merupakan salah satu unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air payau.

Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Triwulan I Tahun 2024 menyajikan capaian indikator kinerja selama Januari s.d Maret 2024. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya pada Triwulan I sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Berdasarkan target triwulanan pada rencana aksi BPBAP Ujung Batee Tahun 2024, dari total 24 indikator kinerja pendukung sasaran strategis, sebanyak 8 indikator kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Triwulan I, dan indikator kinerja yang tidak ada data capaiannya sebanyak 16 indikator karena tidak ditarget pada Triwulan I 2024.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPBAP Ujung Batee Tahun 2024 ini antara lain adanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum semuanya terlaksana masih ada beberapa paket dalam masa pelaksanaan kontrak.

Dalam rangka peningkatan kinerja BPBAP Ujung Batee, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Memperkuat koordinasi dengan instansi pusat maupun instansi lain, khususnya pada pelaksanaan kegiatan yang akan berpengaruh pada capaian indikator kinerja;
2. Monitoring dan evaluasi pada setiap minggu pertama bulan berjalan (Januari – Desember 2024; Setiap Triwulan Tahun 2024; Setiap Semester Tahun 2024);
3. Rapat pengendalian rutin.

Aquaculture is future



Tugas

Melaksanakan uji terap dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknik perikanan budidaya air payau

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Jalan Laksamana Malahayati Km. 16 Ujung Batee, Masjid Raya, Kab Aceh Besar, Prov Aceh

Telepon : 082273830002 | email : tu.bbapub@gmail.com

<https://kkp.go.id/djpb/bpbapujungbatee>